

UNDANG - UNDANG DESA

[UNDANG-UNDANG DESA NOMOR 06 TAHUN 2014](#)

[PENJELASAN UNDANG-UNDANG DESA NOMOR 06 TAHUN 2014](#)

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DESA

- [PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA](#)
- [PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA](#)
- [PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA](#)
- [PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA](#)
- [PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA](#)

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI (KEMENDAGRI) TENTANG DESA

- [PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DESA](#)
- [PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA](#)
- [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa \(BPD\). \(Lampiran\)](#)
- [PERMENDAGRI NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA. \(Lampiran\)](#)
- [PERMENDAGRI NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG LAPORAN KEPALA DESA \(Lampiran\)](#)
- [PERMENDAGRI NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA \(Lampiran\)](#)
- [PERMENDAGRI NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG KEWENANGAN DESA](#)
- [PERMENDARI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA. \(Lampiran\)](#)
- [PERMENDAGRI NOMOR 81 TAHUN 2015 TENTANG EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN \(Lampiran I\) \(Lampiran II\) \(Lampiran III\)](#)
- [PERMENDAGRI NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.](#)
- [PERMENDAGRI NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.](#)

- [PERMENDAGRI NOMOR 84 TAHUN 2015 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PERANGKAT DESA.](#)
- [PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA \(Lampiran\)](#)
- [PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA](#)
- [PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA \(Lampiran\)](#)
- [PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA \(Lampiran\)](#)

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI (KEMENDESA, PDTT).

- [PERMENDES NO 2 TAHUN 2016 TENTANG INDEKS DESA MEMBANGUN](#)
- [PERMENDES NO 22 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2017.](#)
- [PERMENDES NO 2 TAHUN 2016 TENTANG INDEK DESA MEMBANGUN](#)
- [PERMENDES NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN \(PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI\)](#)
- [PERMENDES NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PELATIHAN MASYARAKAT](#)
- [PERMENDES NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDES NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2016.](#)
- [PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2016.](#)
- [PERMENDESA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA](#)
- [PERMENDESA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TATA TERTIB DAN MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA](#)
- [PERMENDESA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENDAMPINGAN DESA](#)
- [PERMENDESA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA \(BUMD\)](#)
- [PERMENDESA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015](#)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

- [PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 125/PMK.07/2016 TENTANG PENUNDAAN PENYALURAN SEBAGIAN ALOKASI UMUM TAHUN ANGGARAN 2016.](#)
- [BARU: PMK TENTANG PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 2016, PMK NOMOR 48/PMK.07/2016.](#)
- [PERATURAN MENTERI KEUANGAN \(PMK\) NOMOR 247/PMK.07/2015 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA.](#)

PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN BARANG/JASA (LKPP) TENTANG DESA

- [PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 13 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA.](#)
- [PERATURAN KEPALA \(PERKA\) LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA NOMOR 13 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA.](#)

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

- [PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP GAMPONG](#)
- [PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN GAMPONG](#)
- [PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG BESARAN BELANJA APARATUR GAMPONG DAN BELANJA NON APARATUR DI GAMPONG \(Lampiran\)](#)
- [PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH GAMPONG PADA BADAN USAHA MILIK GAMPONG](#)
- [PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA GAMPONG \(ADG\) KOTA BANDA ACEH TAHUN 2015](#)
- [PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI GAMPONG](#)